



# Newsletter Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

## PENDAMPINGAN LPSE DALAM FORUM KOMUNIKASI PBJ UPT LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN



Peresmian Pembukaan Acara Forum Komunikasi PBJ UPT Lingkup Kementerian Pertanian  
Oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Didampingi Kepala BPTP Sulawesi Selatan dan  
Narasumber Dari LKPP (Dokumentasi Foto: Biro Umum dan Pengadaan)

Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertanian ikut menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan – Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian di Hotel Clarion Makassar pada tanggal 4 – 5 Juni 2018. Dr. Ir. Abdul Wahid, MS selaku Kepala BPTP Sulawesi Selatan memberikan

sambutan dalam acara Forum Komunikasi Pengadaan Barang/Jasa UPT Lingkup Kementerian Pertanian. Ir. Sri Sulihati, M.Sc selaku Kepala Biro Umum dan Pengadaan dalam pengarahannya menginformasikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini dititik beratkan untuk melakukan sosialisasi

### Tim Redaksi :

**Pengarah :**  
Kapusdatin

**Penasehat :**  
Kepala Bagian Umum

**Penanggung Jawab :**  
Kasubag Pelayanan dan Publikasi Data

**Redaktur :**  
Dhanang Susatyo, SE

**Editor :**  
Hani Hanifah R., S.Kom  
Dra. P.Hanny Muliany, MM  
Budi Setiono  
Hety Sulistiyowati, ST

**Fotografer :**  
Cahyani Wartianingsih S.Kom  
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

**Desain Grafis :**  
Suyati, S.Kom  
Sri Lestari, SE

**Sekretariat :**  
Iswadi  
Eli David, S.Sos, MM  
Murdino  
Suparmi

### alamat redaksi :

Pusat Data dan Sistem Informasi  
Pertanian Jl. Harsono RM No. 3  
Gd. D Lantai IV  
Pasar Minggu – Jakarta 12550  
Telp : 021-7805305, 7816384  
Fax : 021-7822638  
e-mail :

[newsletter@pertanian.go.id](mailto:newsletter@pertanian.go.id)

### DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pendampingan LPSE Dalam Forum Komunikasi PBJ UPT Lingkup Kementerian Pertanian .....                               | 1  |
| Monitoring Upsus Siwab di DKI Jakarta .....                                                                        | 4  |
| Para Pejuang Data Pertanian (Episode BIMTEK Petugas Pengumpul Data di Sumatera Utara) .....                        | 6  |
| Penundaan Lomba Inovasi TIK Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 .....                                         | 8  |
| Workshop Aplikasi SIPEDAS (Sistem Informasi Penyediaan Data Strategis) Cabai, Bawang Merah, dan Bawang Putih ..... | 9  |
| Perkembangan Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Masyarakat Indonesia .....                                        | 11 |

Perpres 16/2018. Kegiatan ini dipandang perlu karena 85% anggaran dalam Kementerian Pertanian merupakan anggaran pengadaan barang/jasa dan Kementerian Pertanian sendiri termasuk dalam sepuluh besar Kementerian yang memiliki dana pengadaan barang/jasa. Selanjutnya peresmian pembukaan acara ini dilakukan oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan dengan memukul gong didampingi Kepala BPTP Sulawesi Selatan dan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Acara yang berlokasi di Makassar kali ini diperuntukkan untuk Unit Layanan Pengadaan-Unit Pelaksana Teknis (ULP-UPT). Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah tujuh UPT di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan, Papua, dan Maluku.

Materi yang dipaparkan dan didiskusikan adalah topik yang sedang hangat yaitu mengenai Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dengan narasumber dari LKPP.

16/2018 disebut saling melengkapi Perpres 54/2010 karena ada beberapa peraturan yang tidak diatur dalam Perpres 16/2018 tetapi sudah diakomodir



Pokok Perubahan Perpres 16/2018 (Dokumentasi: LKPP)

Perpres 16/2018 merupakan Perpres terbaru dalam ranah pengadaan untuk saling melengkapi Perpres sebelumnya yaitu Perpres 54/2010. Keberadaan Perpres

dalam Perpres 54/2010. Pokok perubahan dalam Perpres 16/2018 adalah simplifikasi isi Perpres, mengatur hal yang bersifat normatif saja, menghilangkan bagian penjelasan sehingga jumlah Bab dan Pasal Perpres 16/2018 lebih singkat daripada Perpres sebelumnya. Walaupun begitu, peraturan yang lebih rinci dapat dijelaskan melalui Peraturan Lembaga yang akan dikeluarkan oleh LKPP. Selain itu struktur Perpres lebih sederhana dan menerapkan praktek terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Poin yang cukup menonjol dari Perpres 16/2018 yaitu terkait struktur organisasi antara ULP dengan LPSE. Bila struktur organisasi ULP dan LPSE sebelumnya tidak diatur karena



Forum Komunikasi PBJ UPT Lingkup Kementerian Pertanian  
-5.16849, 119.43203, 68.3m, 64°  
Jun 4, 2018 9:44:28 AM

Peserta Acara Forum Komunikasi PBJ UPT Lingkup Kementerian Pertanian (Dokumentasi Foto: Biro Umum dan Pengadaan)

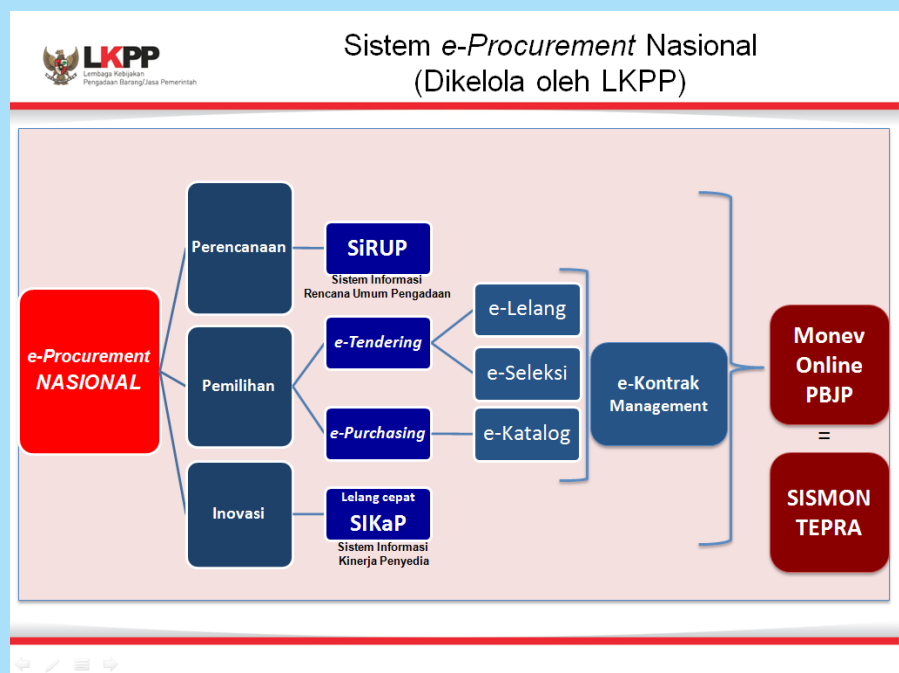
masih berdiri secara terpisah, di masa yang akan datang kedua organisasi ini akan dijadikan dalam satu wadah dengan sebutan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau UKPBJ. Meskipun begitu, tetap terdapat sekat antara kedua organisasi ini untuk menghindari konflik kepentingan saat proses pelaksanaan lelang.

Penerbitan Perpres 16/2018 tentu saja mempengaruhi bisnis proses pada aplikasi yang terkait dengan proses lelang. Karena aplikasi yang terkait dengan proses lelang ini merupakan implementasi nyata dari penerapan peraturan yang diterbitkan. Implementasi peraturan ke dalam aplikasi mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Contoh implementasi Perpres 16/2018 adalah dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Pada aplikasi SiRUP Versi 2 yang terikat dengan Perpres 54/2010, pihak yang terlibat di dalam aplikasi hanya PA/KPA saja dengan dibantu oleh Admin PA/KPA (dalam hal ini adalah staf). Di aplikasi SiRUP Versi 2, PA/KPA bertugas untuk mengunggah data RKAKL, melakukan proses identifikasi pemaketan, melengkapi data pemaketan dan terakhir mengumumkan paket yang sudah diidentifikasi dan dilengkapi datanya. Tetapi mulai tanggal 1 Juli 2018, proses-proses tersebut harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK). Melalui aplikasi SiRUP V.2.3 tugas tersebut didelegasikan oleh PA/KPA ke masing-masing PPK yang ditunjuk.

Selain pemaparan mengenai Perpres 16/2018, LKPP pun memaparkan mengenai aplikasi SPSE Versi 4.2 yang harus mulai digunakan juga per tanggal 01 Juli 2018. Penggunaan aplikasi versi ini diwajibkan karena aplikasi ini sudah mulai disesuaikan dengan Perpres terbaru dan masih terus dikembangkan hingga sesuai dengan peraturan yang ada. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

proses pemilihan dan inovasi yang akan memudahkan pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Pada bagian perencanaan terdapat aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau lebih dikenal dengan aplikasi SiRUP. Di bagian pemilihan terdapat aplikasi *ePurchasing* dan *eTendering* yang terdiri dari aplikasi eLelang, eSeleksi dan eKatalog. Aplikasi dalam pemilihan akan tercatat di aplikasi eKontrak. Di bagian inovasi ada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). Seluruh inputan dalam aplikasi ini akan tercatat di



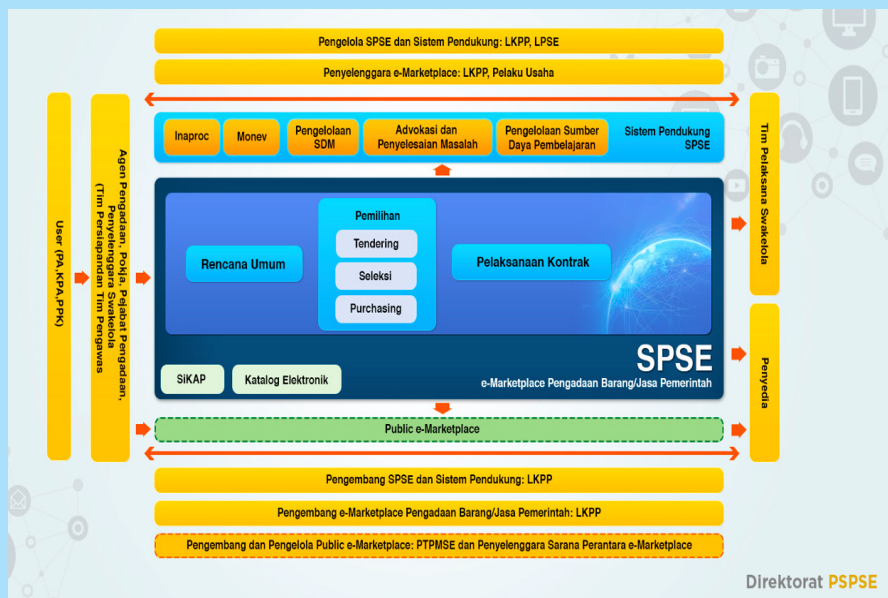
Sistem Pengadaan e-Procurement Nasional (Dokumentasi: LKPP)

LKPP—Gatot Pambudhi Poetranto memaparkan sistem *e-Procurement* Nasional yang dikelola oleh LKPP.

LKPP mengembangkan *eProcurement* nasional yang terdiri dari perencanaan,

aplikasi *Monev Online* PBJ atau SIMON TEPRAs.

Selain penjelasan terkait hal tersebut di atas, Gatot pun menjelaskan terkait penggunaan *eMarket Place* yang sudah diatur di Pasal 70.



Konsep e-Market Place Pengadaan Pemerintah (Dokumentasi: LKPP)

Place LKPP dapat bekerjasama dengan UKPBJ dan/atau pelaku usaha.

Pada acara ini, selain pokja pengadaan ULP-UPT diberikan informasi terbaru mengenai peraturan terkait pengadaan dan aplikasi yang akan mereka gunakan, ULP membuka sesi diskusi untuk mengetahui kendala dan harapan pokja ULP-UPT. Seperti kendala bahwa di Papua masih ada pokja pengadaan yang belum tersertifikasi sedangkan saat ini, pokja yang tersertifikasi merupakan sesuatu yang wajib. Sesi diskusi ini akan menjadi salah satu acuan program kerja ULP dan LPSE untuk membantu proses pengadaan di Kementerian Pertanian. (Lilik)

*eMarket Place* Pengadaan Barang/Jasa sendiri adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah yaitu melalui katalog elektronik, toko daring (*online shop*) dan

pemilihan penyedia dengan menggunakan SPSE. Katalog elektronik pun mempunyai tiga jenis katalog elektronik yaitu katalog nasional, sektoral dan lokal. Proses pengembangan dan pengelolaan *eMarket*

## MONITORING UPAYA KHUSUS SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (SIWAB) DI DKI JAKARTA

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian merupakan salah satu Penanggung Jawab UPSUS SIWAB, wilayah yang menjadi tanggung jawab monitoring adalah Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 2-3 Agustus 2018 Tim PUSDATIN melakukan kegiatan monitoring UPSUS SIWAB di Provinsi DKI Jakarta. Monitoring ini merupakan upaya Pusdatin menaikkan data PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) dan Kelahiran Sapi di peternak-peternak yang berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Dalam melakukan

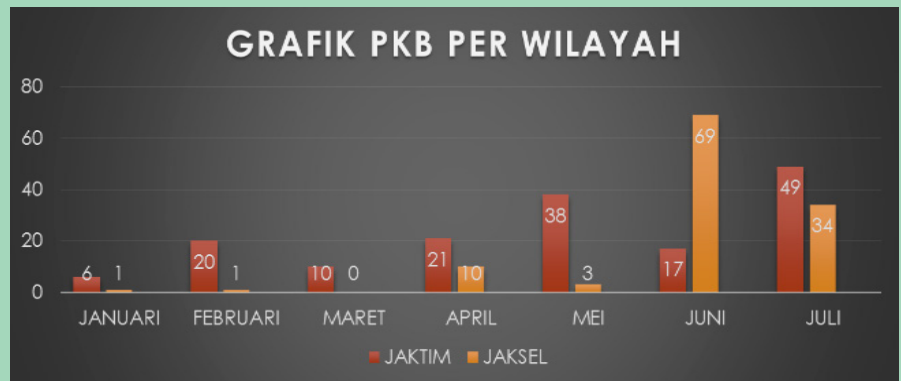


Wawancara dengan Peternak Pondok Rangan

monitoring, petugas dibagi menjadi 3 (tiga) dan diberikan tanggung jawab berdasarkan

wilayah monitoring yaitu Tim 1 (Mampang), Tim 2 (Pancoran dan Pasar Minggu) dan Tim 3

(Cipayung Pondok Rangun). Tim terdiri dari Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) DKI Jakarta; Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur; Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pusdatin. Realisasi PKB periode Januari-



Realisasi PKB Sapi Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan Bulan Januari-Juli 2018

Provinsi ini sebanyak 659 ekor, namun realisasi sampai dengan

atau diganti ke sapi lainnya, sapi yang telah di IB kemudian dijual oleh peternak, masih terbatasnya kemampuan petugas pemeriksa kebuntingan (PKb) dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan tidak semua petugas inseminator mempunyai kemampuan melakukan pemeriksaan kebuntingan (PKb), Beban kerja petugas yang banyak sehingga data PKb dan kelahiran tidak sepenuhnya dilaporkan ke dalam iSIKHNAS (Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional), disamping itu peternak tidak aktif melaporkan ke petugas bahwa sapi telah lahir sehingga informasi tersebut terlewatkan untuk dilaporkan ke iSIKHNAS. (Diah Indarti).



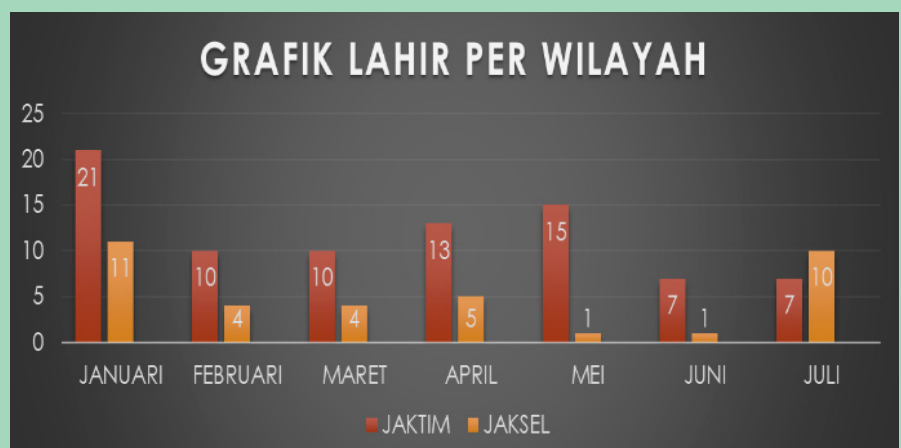
Monitoring UPSUS SIWAB milik peternak berlokasi di Mampang

Juli 2018 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 279 ekor yang terdiri dari wilayah Jakarta Timur sebanyak 161 ekor dan Jakarta Selatan sebanyak 118 ekor. Sementara target PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) untuk Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sebanyak 797 ekor. Namun capaian sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar 440 ekor atau 63,41%.

Kelahiran sapi pada periode Januari-Juli 2018 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 119 ekor yang terdiri di wilayah Jakarta Timur 83 ekor dan Jakarta Selatan 36 ekor. Target kelahiran sapi di

Juli 2018 sebanyak 379 ekor atau 31,40%.

Petugas survei mencatat beberapa permasalahan yang terdapat di lapangan antara lain: ID tag ternak hilang, kotor



Realisasi Kelahiran Sapi Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan Bulan Januari-Juli 2018

## PARA PEJUANG DATA PERTANIAN (EPISODE BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGUMPUL DATA DI SUMATERA UTARA)

Mengumpulkan data pertanian bukanlah hal yang mudah, dengan tantangan kondisi alam dan sumber daya yang terbatas para pejuang data pertanian harus mengumpulkan data yang kehadirannya dinanti oleh para pengambil kebijakan. Data yang dikumpulkan oleh para pejuang data sangatlah penting karena menjadi penentu kebijakan yang akan ditetapkan. Tak jarang berbagai kalangan ahli dan praktisi di “heboh”kan oleh data misalnya data produksi padi atau bahan pangan lainnya.

Siapakah gerangan yang dimaksud para pejuang data pertanian tersebut? Para pejuang data pertanian sebagai “Ujung Tombak” yang menghadirkan data dari Kecamatan. Mereka biasa disebut petugas pengumpul data pertanian di kecamatan atau Mantri Tani atau Kepala Cabang Dinas (KCD). Pekerjaan seorang mantri tani tak bisa dianggap enteng, karena memang profesi ini tergolong cukup beresiko karena hasil pengumpulan datanya menjadi penentu terhadap kebijakan bahan pangan nasional. Jika dikaji dari istilah “Mantri Tani” bukanlah seputaran pemeriksaan kesehatan lingkup pertanian, karena menilik dari nama ‘mantri’ pasti sebagian besar orang berpikiran hal itu berkaitan dengan kesehatan. Di dunia pertanian, mantri tani

ini bertugas mendata kondisi pertanian mulai luas tanam, hingga panen juga pendataan secara statistik sehubungan dengan kondisi di lapangan seperti luas lahan, benih, jenis pengairan dan alat mesin pertanian yang selanjutnya dilaporkan ke kabupaten, provinsi dan ke pusat.

Terkait dengan kualitas data produksi yang “heboh” atau dipertanyakan akurasi datanya. Berbagai upaya telah dilakukan baik secara perhitungan manual maupun pemanfaatan berbasis Satelit oleh BPS melalui Kerangka Sampel Area (KSA) yang akan digunakan. Tentunya peralihan dari sistem manual (perkiraan luasan) melalui *eye estimate* menuju Sistem berbasis Satelit memerlukan waktu. Sementara data pertanaman (luas tanam dan panen) untuk padi, jagung dan kedelai serta bahan pangan lainnya terus diperlukan tanpa pengecualian adanya waktu peralihan tersebut. Sebagai contoh, hingga saat ini jika ingin mengetahui berapa data produksi misalkan saja beras maka perlu melihat kembali bagaimana cara mendapatkan data produksi tersebut dengan menghitung data produksi dari tingkat petani sedemikian rupa sehingga akhirnya diperoleh data produksi beras nasional. Dalam perjalanannya, perhitungan produksi beras

bukanlah menimbang langsung hasil panen petani satu per satu tetapi pendekatannya dengan menghitung jumlah luasan panen padi dalam satu wilayah di seluruh Indonesia (dalam satuan Hektar) dikalikan produktivitas padi (dalam satuan kuintal/hektar). Data luas panen padi selama ini dikumpulkan oleh petugas di lapang melalui pendekatan laporan komplit atau disebut *complete report*, artinya dalam setiap kecamatan di seluruh Indonesia melaporkan seluruh penanaman padi. Petugas dalam mendapatkan data luas panen di tingkat Kecamatan dilakukan dengan metode *eye estimate* (pandangan mata), bisa melalui perhitungan jumlah benih padi yang digunakan, menghitung luasan pengairan irigasi dan bisa pula menanyakan kepada aparat desa. Lain halnya dengan pengukuran produktivitas padi, metode yang digunakan sudah menggunakan pendekatan survei melalui kaidah-kaidah statistik. Frame sampling untuk mengukur produktivitas menjadi wewenang Badan Pusat Statistik (BPS), pendekatan sampling yang digunakan oleh BPS dalam menentukan sampel pengukuran produktivitas padi dikenal dengan metode *multi stage sampling*, dimana unit sampling terendah adalah petakan sawah yang dikuasai oleh Rumah Tangga Petani

dalam wilayah Blok Sensus (BS) terpilih. Istilah BS merupakan penciri wilayah sampling terkecil yang dibatasi oleh alam dan sering digunakan oleh BPS dalam melakukan berbagai survei. Setelah sampel dipilih, maka untuk mendapatkan produktivitas padi per hektar, petugas di lapang melakukan pengukuran langsung terhadap tanaman padi yang siap panen dengan alat Ubinan dengan ukuran 2,5 m X 2,5 m. Padi yang dipanen selanjutnya diproses sedemikian rupa mengikuti kebiasaan panen petani, kemudian hasilnya ditimbang untuk ukuran ubinan tersebut. Gabah yang dipanen dari hasil ubinan tersebut dikategorikan sebagai Gabah Kering Panen (GKP).

Sekelumit rincian diatas, kiranya dapat menggambarkan betapa para pejuang data atau Mantri Tani sangat berperan dalam proses pengumpulan data luas panen padi, sedangkan data produktivitas padi dikumpulkan bersama petugas dari BPS Kabupaten/Kota atau sering disebut KSK.

Kembali kepadatugas Mantri Tani yang sangat berperan terhadap data penentu kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap bahan pangan nasional. Upaya untuk mewujudkan kapabilitas para petugas tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis pada tanggal 2-3 Agustus 2018 di Hotel Garuda Plaza Medan. Peserta terdiri

dari 33 orang mantri tani yang berasal dari 22 kabupaten/kota, sedangkan petugas dari kabupaten/kota sebanyak 17 orang. Pusdatin dalam acara ini berperan sebagai narasumber menyampaikan materi tentang Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan.

Dalam sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Ir. Nurhijah, menyatakan bahwa Mantri tani perlu berkoordinasi dengan



Narasumber dari Pusdatin menyampaikan Materi Pengumpulan Data Tanaman Pangan

seluruh sumber informasi di lapangan seperti aparat desa, penyuluh pertanian, Petugas pengamat hama dan penyakit (POPT PHP), Kelompok Tani dan lain-lain agar mendapatkan keakuratan data. Dalam kesempatan yang sama disampaikan pula keberhasilan yang sudah dicapai oleh sektor pertanian Sumatera Utara yang notabene merupakan bagian dari hasil kerja mantri tani yaitu data yang menunjukkan peningkatan produksi yang cukup signifikan khususnya komoditi Padi, Jagung dan Kedelai. Pada tahun 2017, berdasarkan angka

tetap peningkatan produksi padi mencapai 11,42% dan pada tahun 2018 berdasarkan angka ramalan I produksi padi diperkirakan meningkat 3,42% dengan produksi mencapai 5,31 juta ton dari sebelumnya 5,14 juta ton. Komoditas jagung, juga meningkat sebesar 11,80% pada tahun 2017 dan diramalkan tahun 2018 meningkat 0,91% dari 1,74 juta ton akan menjadi 1,76 juta ton serta peningkatan

produksi kedelai sebesar 53,65 % pada tahun 2017 dan akan meningkat 321,16% pada tahun 2018 atau dari jumlah produksi 7,78 ribu ton menjadi 32,76 ribu ton.

Masih adanya berbagai kendala yang kerap dihadapi oleh petugas dilapang yaitu masih minimnya dukungan fasilitas untuk meningkatkan

kinerja pengumpulan data dan kelengkapan alat untuk mengubin, selain itu banyaknya beban tugas yang harus diemban oleh mantri tani dimana juga merangkap tugas ikut membantu penyuluh menangani data, menangani data perkebunan, pembinaan dan pelayanan kelompok tani, sebagai kepala BP3K, BPP, BPK, POPT/PHP. Hal tersebut berpotensi terhadap kurang fokusnya terhadap kegiatan pengumpulan data tanaman pangan dengan fasilitas yang minim. (📝 Hanny Muliany).

## PENUNDAAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2018

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan layanan informasi pertanian dengan menjadikan TIK sebagai acuan utama pencarian informasi, membuka akses seluas-luasnya berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan transparansi baik di pusat maupun di daerah serta menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang e-Government, sejak tahun 2004 Kementerian Pertanian telah menyelenggarakan Lomba Web Tingkat Eselon I, SKPD provinsi dan kabupaten/kota Lingkup Pertanian se Indonesia. Untuk tahun 2018 ini lomba situs web berubah konsep menjadi lomba inovasi TIK sebagai wadah untuk membuat inovasi dibidang pertanian baik yang bersifat layanan internal ataupun eksternal, dengan kategori peserta Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, OPD provinsi dan kabupaten/kota lingkup pertanian serta UPT Pusat lingkup Kementerian Pertanian.

Lomba Inovasi TIK merupakan inovasi dari Lomba Website yang diselenggarakan di lingkup Kementerian Pertanian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun Tema dari Lomba Inovasi TIK ini adalah "*Inovasi Pemanfaatan TIK untuk*

*peningkatan layanan pertanian*". Perbedaan dengan lomba sebelumnya, lomba inovasi TIK ini memiliki beberapa kategori yang akan di lombakan, yaitu (1) Website, pada kategori ini akan dipilih 1 website terbaik di masing-masing tingkat UPT, OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota; (2) Aplikasi Layanan Publik, pada kategori ini akan dipilih 1 aplikasi layanan publik terbaik di masing-masing tingkat eselon 1, UPT, OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota; (3) Aplikasi Layanan Internal, pada kategori ini akan dipilih 1 aplikasi layanan internal terbaik di masing-masing tingkat eselon 1, UPT, OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota; (4) Inovasi TIK, pemenang lomba kategori ini akan diambil 1 karya inovasi dari seluruh peserta tingkat eselon 1, UPT, OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota; (5) Leadership, pada kategori ini akan dipilih 1 terbaik leadership menurut penilaian juri dari seluruh peserta tingkat eselon 1, UPT, OPD provinsi dan OPD kabupaten/kota.

Adapun Tujuan dari penyelenggaraan lomba inovasi TIK ini adalah: (1) Memotivasi semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, semua OPD lingkup pertanian provinsi, semua OPD lingkup pertanian

kabupaten/kota serta semua UPT Pusat lingkup pertanian untuk mengkoordinasikan pengisian dan peremajaan data dan informasi yang ditampilkan; (2) Membuka akses informasi yang seluas-luasnya sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (3) Mengimplementasikan peraturan penggunaan sub domain go.id.; (4) Memberikan apresiasi UK, UPT, OPD provinsi, OPD kabupaten/kota yang telah memiliki situs yang baik dan transparan; (5) Memberikan dorongan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan TIK di lingkup pertanian; (6) Menunjukkan kinerja yang belum diketahui masyarakat; (7) Membuat inovasi TIK dibidang pertanian; (8) Meningkatkan layanan Internal maupun publik di Kementerian Pertanian.

Kriteria-kriteria yang akan kami nilaikan ada lomba inovasi TIK ini adalah: (1) Kategori Website mengenai a) kualitas isi situs web, b) kualitas fitur situs web, c) kinerja situs web; (2) Kategori Aplikasi Layanan Publik a) kualitas fitur aplikasi layanan publik, b) respon layanan untuk publik, c) manfaat aplikasi layanan publik; (3) Kategori Aplikasi Layanan Internal, a) kualitas fitur aplikasi layanan internal, b) respon layanan untuk

internal, c) manfaat aplikasi layanan publik; (4) Kategori Inovasi TIK, a) kebaruan/keunikan, b) dampak/perubahan, c) implementasi, d) biaya.

Sehubungan dengan adanya refokusng anggaran Pusdatin Tahun 2018, dengan ini kami beritahukan bahwa Penilaian Lomba Inovasi TIK Kementerian Pertanian tahun 2018 **ditunda** pelaksanaannya menjadi Tahun 2019. Penundaan ini juga memberikan kesempatan bagi unit kerja yang telah dan akan mendaftar untuk mengikuti inovasi TIK untuk dapat mempersiapkan lebih maksimal terkait keikutsertaan pada Lomba Inovasi TIK tahun 2019. Dengan Tujuan dan Kriteria Lomba Inovasi TIK lingkup Kementan Tahun 2018 ini akan terus kami gunakan sebagai dasar bagi Lomba Inovasi TIK yang akan diselenggarakan Tahun 2019.

Adapun bagi peserta yang sudah terdaftar dan sudah melengkapi dokumen pendukung pada tahun 2018, secara otomatis akan terdaftar sebagai peserta lomba Inovasi TIK pada tahun 2019.

Sebagai kelengkapan dokumen pendukung penilaian, peserta harus melengkapi dokumen sebagai berikut: (1) Form pendaftaran online; (2) Cover pendaftaran peserta lomba; (3) Mengisi dan mengirimkan Form A bagi peserta kategori Aplikasi Layanan Publik; (4) Mengisi dan mengirimkan Form B bagi peserta kategori Aplikasi Layanan Internal; (5) Mengisi dan mengirimkan Form C bagi peserta kategori Inovasi TIK; (6) Mengisi dan mengirimkan Form D bagi peserta kategori Website; (7) Dokumen pendukung Form A,B,C, dan D dalam penilaian aplikasi (Bisnis proses aplikasi, Capture aplikasi, dll).

Kelengkapan Dokumen

dapat dikirim kepada panitia lomba melalui e-mail [lombainovastik@pertanian.go.id](mailto:lombainovastik@pertanian.go.id) atau [hanihanifah@pertanian.go.id](mailto:hanihanifah@pertanian.go.id). Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia di nomor telp/fax: 021-78841931/081220333013.

Surat pemberitahuan penundaan Lomba Inovasi TIK akan dikirimkan ke seluruh OPD provinsi/ kabupaen/ kota dan Eselon I serta UPT Pusat lingkup Kementerian Pertanian. Bagi Eselon I , UPT Pusat Lingkup Kementan dan OPD provinsi/kabupaten/kota yang belum mendaftar, nanti kita akan membuka pendaftaran kembali pada waktu yang akan kami tentukan kemudian. Silahkan mempersiapkan website, aplikasi layanan publik, aplikasi layanan internal ataupun inovasi layanan yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja.

( Hani HR)

## WORKSHOP APLIKASI SIPEDAS (SISTEM INFORMASI PENYEDIAAN DATA STRATEGIS) CABAI, BAWANG MERAH, DAN BAWANG PUTIH

Mengacu kepada Permentan No. 14.1/Permentan/RC.220/4/2015 komoditas strategis pada subsektor hortikultura adalah bawang merah, dan cabai, disamping beras, jagung, kedelai, daging dan gula. Bahkan untuk tahun 2018 ditambahkan bawang

putih. Setidaknya ada 6 alasan mengapa komoditas tersebut menjadi prioritas, yakni produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, ketersediaannya tergantung musim dan alam (agroklimat), terdapat ketimpangan antara ketersediaan, kebutuhan, dan

harga. Komoditas pemicu inflasi, diatur dalam rekomendasi impor produk hortikultura, menjanjikan dari aspek ekonomi dan bisnis, sehingga menarik bagi pelaku usaha.

Setiap tahun terjadi gejolak yang luar biasa dan menjadi bahasan utama bagi sejumlah

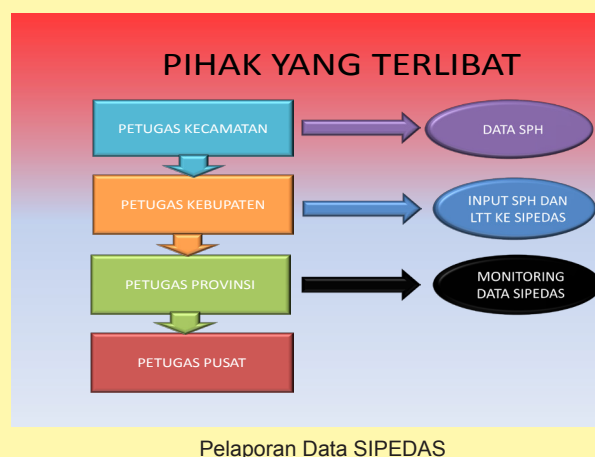
keadaan riil di lapangan sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan luas panen, produksi, ketersediaan dan stok hingga 2 atau 3 bulan kemudian.

Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2018 di Holiday Inn Bandung. Acara ini di hadiri oleh tugas pengelola data hortikultura dari Dinas Pertanian 8 provinsi/kota/kabupaten/ sentra sebanyak 88 petugas (8 provinsi dan 80 kabupaten/kota). Wakil dari direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Sementara peserta dari provinsi yang hadir yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Materi utama yang disampaikan pada kegiatan ini adalah pengenalan tata cara operasional Aplikasi **SIPEDAS** (Sistem Penyediaan Data Strategis) kepada petugas dinas di wilayah sentra yang menangani data cabai besar, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih baik di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi. Peserta dari kabupaten mempraktekan input

data berdasarkan data bulanan yang dibawa mulai dari Januari hingga Juni 2018.

Peserta yang sudah mendapat pelatihan diharapkan menyebarkan ilmunya kepada petugas dari provinsi/kota/kabupaten lain yang tidak mendapat pelatihan. Untuk kedepannya 325 provinsi/kota/kabupaten yang tidak dilatih, diharapkan dapat menginput data SPH dan LTT 4 komoditas strategis tersebut ke dalam aplikasi **SIPEDAS**, sehingga cakupan wilayah pelaporan menyeluruh di 34 provinsi. Operasional selanjutnya untuk pengisian Aplikasi **SIPEDAS** akan melibatkan semua petugas kecamatan yang bertugas mengumpulkan sekaligus mengisi data di formulir SPH. Setelah terisi sesuai dengan kondisi di lapangan, petugas kecamatan akan menyerahkan formulir ke petugas kabupaten/kota untuk diverifikasi dan diinput ke dalam aplikasi SIPEDAS. Hasil inputan dapat langsung dimonitor oleh petugas provinsi dan pusat. Alur pelaporan dapat dilihat pada alur di bawah.



Bagi para pengguna data dapat mengakses Aplikasi SIPEDAS pada alamat : hortikultura2.pertanian.go.id dan akan keluar tampilan seperti di bawah ini.

(  Dyah Riniarsi).



Aplikasi SIPEDAS pada alamat: hortikultura2.pertanian.go.id

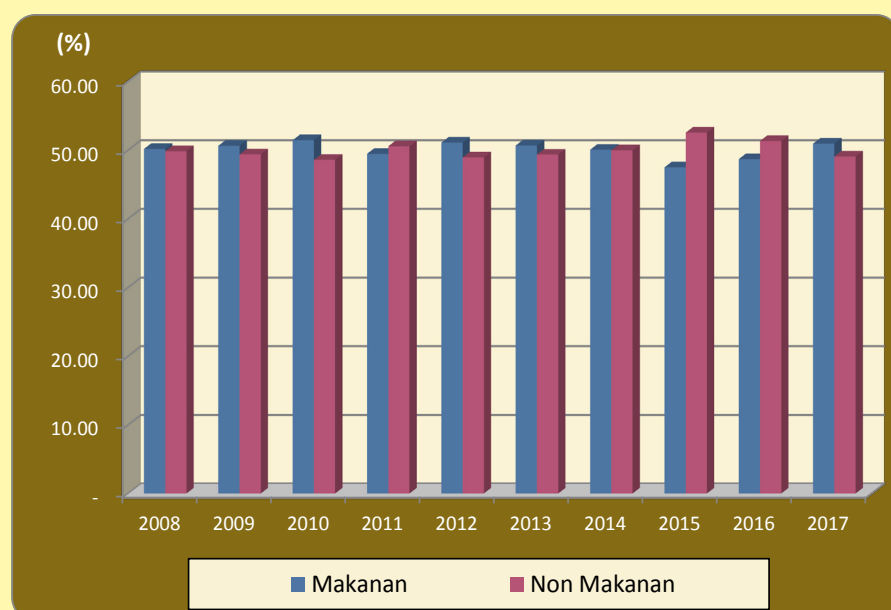
## PERKEMBANGAN PENGELUARAN MAKANAN DAN NON MAKANAN MASYARAKAT INDONESIA

Pengeluaran penduduk Indonesia per bulan berdasarkan hasil Susenas dibedakan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Besarnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tahun 2017 untuk bahan makanan adalah sebesar Rp. 527.956,- dan non makanan sebesar Rp. 508.541,- (Gambar 1).

Pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan tahun 2017 sebagian besar dialokasikan untuk makanan dan minuman jadi yang mencapai 32,69%, disusul rokok sebesar 12,42%, padi-padian 11,64%, sayur-sayuran sebesar 8,03%, ikan sebesar 7,67%, telur dan susu sebesar 5,56%, sementara kelompok makanan

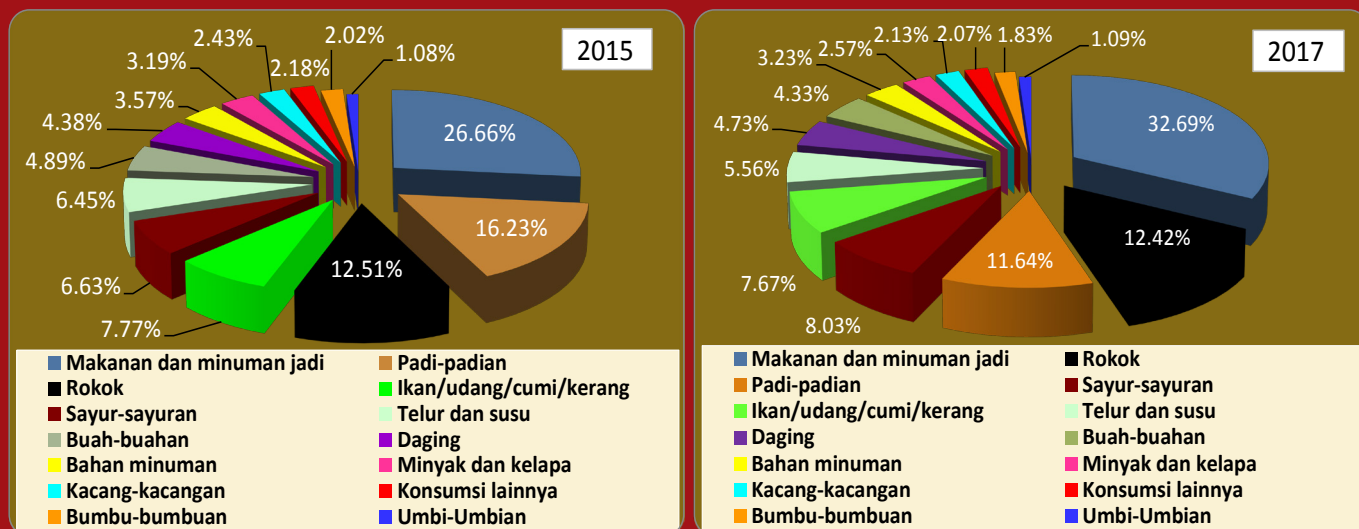
lainnya kurang dari 5%.

Pola pengeluaran penduduk Indonesia untuk bahan makanan selama 3 tahun terakhir terlihat mengalami perubahan yang relatif signifikan terutama untuk rokok dan tembakau. Persentase pengeluaran untuk rokok di tahun 2017 lebih tinggi dari pengeluaran untuk jenis makanan yang lain bahkan padi-padian. Pengeluaran untuk rokok ini terlihat setara dengan pengeluaran untuk sayur dan buah. Hal ini menarik dan perlu dicermati terutama terkait pencapaian ketahanan pangan keluarga. (Gambar 2).



Gambar 1. Perkembangan Persentase Pengeluaran Penduduk Indonesia untuk Makanan dan Non Makanan, Tahun 2008 – 2017

Perkembangan pengeluaran nominal bahan makanan per kapita per bulan tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,15%, namun demikian secara riil hanya meningkat sebesar 8,18%. Apabila ditinjau menurut kelompok barang, pengeluaran



Gambar 2. Persentase Pengeluaran Bahan Pangan Menurut Jenis Tahun 2015 dan 2017

per kapita sebulan untuk padi-padian secara nominal dan riil mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kuantitas konsumsi pada kelompok bahan makanan tersebut. Indikasi penurunan kuantitas konsumsi juga terjadi pada kelompok bahan makanan lainnya mengingat peningkatan pengeluaran riil yang lebih lambat dibandingkan peningkatan pengeluaran nominal. Kelompok komoditas ini adalah minyak dan kelapa serta bumbu-bumbuan.

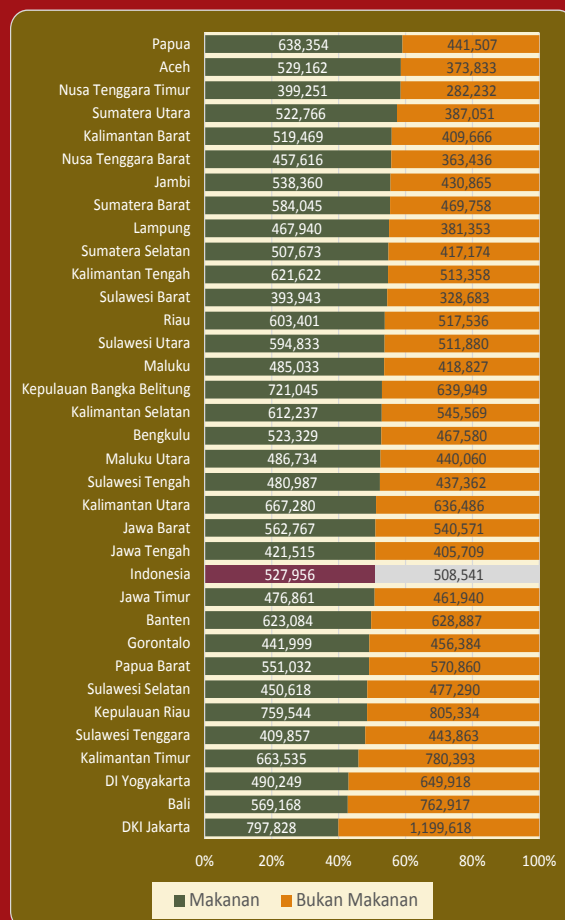
Pertumbuhan tertinggi selama tahun 2015 – 2017 terjadi pada kelompok makanan dan minuman jadi yaitu rata-rata sebesar 25,33% setiap tahunnya. Kelompok komoditas lainnya adalah sayuran dan daging meningkat cukup besar setiap tahunnya pada tahun 2015 – 2017. Hal yang dapat dicermati juga adalah peningkatan pengeluaran untuk rokok. Selama tahun 2015 – 2017, besarnya pertumbuhan pengeluaran untuk rokok ini

setara dengan pertumbuhan pengeluaran untuk umbi-umbian dan ikan. Pertumbuhan pengeluaran untuk rokok ini bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran untuk buah-buahan, telur dan susu dan padi-padian.

Jika dilihat menurut wilayah, DKI Jakarta merupakan daerah dengan nilai pengeluaran per kapita sebulan yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 1.997.446,- sementara yang terendah adalah NTT dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 681.483,- per kapita sebulan. Secara rata-rata nasional, pengeluaran per kapita sebulan adalah Rp. 1.036.497,-.

Proporsi pengeluaran untuk makanan di DKI Jakarta hanya sebesar 39,94% dari total pengeluaran. Sebaliknya di provinsi

Papua proporsi pengeluarannya adalah yang tertinggi secara nasional yaitu sebesar 59,11% dari total pengeluaran. Secara rinci proporsi pengeluaran makanan dan bukan makanan menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.3 ( Wieta).



Gambar 3. Proporsi Pengeluaran Menurut Provinsi, Maret 2017